

TESIS

**KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN) DALAM BENTUK PERSERO**



Disusun Oleh :

**Meidy Yanto Sandi
1920216310033**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2023**

**KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN
DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) DALAM BENTUK PERSERO**

Tesis

Untuk memperoleh gelar Magister

Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

Meidy Yanto Sandi

1920216310033

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2023**

PENGESAHAN REVISI TESIS

Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero

disusun oleh

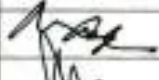

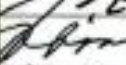


Nama : Meidy Yanto Sandy, S.H

NIM : 1920216310033

Telah dipertahankan di depan dewan Penguji


Pada Tanggal:

Susunan Penguji


No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Prof.Dr.H.M.Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.	Ketua Penguji	
2	Dr.H.Ahmad Syaifi, S.H.,M.H.	Sekretaris	
3	Prof.Dr.H.Djumadi, S.H.,M.Hum	Anggota	
4	Dr.H.Ichsan Anwary,S.H.,M.H	Anggota	
5	Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum	Anggota	

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan


Prof.Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
NIP.19730420 200312 2002

Dekan


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP. 197506152003121001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meidy Yanto Sandi

NIM : 1920216310033

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM
BENTUK PERSERO

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 4 April 2023

Yang membuat Pernyataan

Meidy Yanto Sandi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 168/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

Meidy Yanto Sandy

Dengan Judul Tesis:

Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 3 April 2023

Direktur,



Prof. Dr. s. H. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.

NIP 195912251986031001

RINGKASAN

KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN) DALAM BENTUK PERSERO

Oleh :

Meidy Yanto Sandi¹, Hadin Muhjad², Akhmad Syauffi³

Pemisahan kekayaan berimplikasi pada sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah badan hukum, seperti Persero. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah menimbulkan beberapa persoalan yang layak untuk dikaji. Persoalan-persoalan tersebut yaitu pertama, konsekuensi hukum adanya kekayaan Negara dipisahkan terhadap kekayaan atau aset yang dimiliki persero dapat dikategorikan sebagai kekayaan Negara dilihat dari konsep badan hukum. Kedua, terjadi disharmonisasi mengenai makna keuangan Negara dalam semua peraturan perundang-perundangan di atas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi konflik norma mengenai makna kekayaan negara yang dipisahkan dalam Perseroan Terbatas terhadap kewenangan Badan Pengawas Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan perseroan. Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan asli, baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Status harta kekayaan Perseroan dalam perspektif Keuangan Negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan yang telah disertakan dalam persero bukan lagi menjadi bagian dari keuangan negara. Yang menjadi bagian dari keuangan negara adalah kepemilikan modal yang disertakan yaitu dalam bentuk saham. Berdasarkan doktrin *limited liability* maka pemegang saham yang telah menyertakan modalnya pada persero hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disertakan. Negara yang telah menyertakan modalnya juga berkedudukan sebagai pemegang saham, dan hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disertakan. Penyertaan modal yang dilakukan negara yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari pergeseran rezim yang asal mulanya merupakan bagian dari

1 NPM : 1920216310033

2 Pembimbing Utama

3 Pembimbing Pendamping

keuangan negara yang merupakan rezim hukum publik setelah menjadi penyertaan modal pada persero maka bergeser menjadi rezim hukum privat yang berlaku

KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN) DALAM BENTUK PERSERO

Oleh :

Meidy Yanto Sandi⁴, Hadin Muhjad⁵, Akhmad Syauffi⁶

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

ABSTRAK

Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal tersebut terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Berkaitan dengan di persangkakan dan dituntutnya sejumlah mantan direksi atau direksi Persero atas perbuatan mereka yang merugikan Persero sehingga dikategorikan merugikan keuangan negara, perlu diberikan pemahaman mendalam karena keuangan Persero berdasarkan teori hukum dan teori lingkungan kuasa hukum bukan merupakan keuangan negara sehingga kerugian pada Persero bukan kerugian negara.

Kata Kunci: Keuangan Negara.

4 NPM : 1920216310033

5 Pembimbing Utama

6 Pembimbing Pendamping

*SEPARATED STATE ASSETS IN STATE OWNED ENTERPRISES IN THE FORM
OF PERSERO*

By :

Meidy Yanto Sandi⁷, Hadin Muhjad⁸, Akhmad Syauffi⁹

Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University

ABSTRACT

Legally, the capital that came into the company no longer includes a wealth of capital, but a wealth of the company itself. It is a separation of wealth between shareholders and corporate wealth. In connection with the allegation and demanded in a number of former directors or directors of State Owned Enterprises for their acts detrimental to State Owned Enterprises to be considered detrimental to the state, should be given in depth understanding as financial SOEs based on legal theory and the theory of power law is not a financial loss to the state, so that the State Owned Enterprises is also not harm the country.

Keywords : *State Finances*

7 NPM : 1920216310033

8 Pembimbing Utama

9 Pembimbing Pendamping

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Prof. Dr. H. Hadin Muhjad, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Akmad Syaufi, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa membimbing, memberikan arahan dan masukan serta memotivasi penulis dalam penulisan tesis ini
5. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
7. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

8. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis
9. Kedua orang tua, adik, istri dan anak-anak tercinta atas segala bentuk dukungan doa dan semuanya sehingga memudahkan penulis menyelesaikan penulisan ini

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 4 April 2023

Meidy Yanto Sandi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KEASLIAN PENULISAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	32
 BAB II STATUS KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN BUMN YANG BERBENTUK PERSERO	
A. Cikal Keberadaan Badan Usaha Milik Negara.....	33
B. Kekayaan BUMN sebagai Kekayaan Negara Dipisahkan	39

C. Status Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Perusahaan BUMN Yang Berbentuk Persero.....	55
BAB III IMPLIKASI YURIDIS ADANYA KONFLIK NORMA MENGENAI STATUS KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM PERUSAHAAN BUMN YANG BERBENTUK PERSERO	
A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi Norma Hukum Keuangan Negara Dan Hukum Korporasi Terkait Dengan Pengelolaan BUMN.....	72
B. Kekayaan BUMN adalah BUKAN Kekayaan Negara	85
C. Implikasi Yuridis Adanya Konflik Norma Mengenai Status Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan BumN Yang Berbentuk Persero	93
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	